

Nilai dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

M. Rafiq Efrianda Hutabarat¹, Khairina Tambunan, M.E.I²

^{1,2} Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: m.rafiqefrianda@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Ekonomi dalam perspektif Islam berfokus pada keseimbangan antara aspek material dan non-material yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Tujuan utama bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan nilai-nilai dan dasar-dasar yang mendasari pembangunan ekonomi dalam Islam, yang meliputi prinsip-prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Prinsip tauhid menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk yang berhubungan dengan alam dan sumber daya, harus berada dalam kerangka hubungan dengan Allah. Rububiyah mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara alam, yang menyediakan rezeki dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Khilafah menggarisbawahi bahwa manusia bertanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi, dan tazkiyah berkaitan dengan penyucian diri dalam hubungannya dengan Allah, sesama, dan lingkungan.

Kata Kunci: Pembangunan ekonomi, manusia, pondasi, nilai

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan sering kali digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki arti yang berbeda. Menurut Sukirno, pembangunan ekonomi merujuk pada upaya sistematis dalam suatu ekonomi untuk memperluas aktivitas ekonomi, yang mencakup peningkatan infrastruktur, pertumbuhan jumlah perusahaan, peningkatan pendidikan, serta kemajuan teknologi. Akibat dari perkembangan ini adalah peningkatan lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan kemakmuran masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya, ekonomi pembangunan adalah bidang studi yang fokus pada masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Huda menambahkan bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menciptakan kemakmuran ekonomi di negara atau wilayah guna kesejahteraan penduduknya, yang dipelajari dalam ilmu ekonomi pembangunan. Hal senada juga dikemukakan oleh Huda. *"Economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is known as development economics"*.

Menurut Nafán, istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) umumnya dihubungkan dengan kemajuan ekonomi di negara-negara berkembang. Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan istilah ini sebagai *"economic development is growth plus change"*. Dengan kata lain, dalam memahami istilah pembangunan ekonomi, para ekonom tidak hanya tertarik pada pertumbuhan pendapatan nasional riil, tetapi juga pada modernisasi kegiatan ekonomi, seperti reformasi sektor pertanian tradisional, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses yang meningkatkan pendapatan riil per

kapita suatu negara dalam jangka panjang, disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dalam kajian ekonomi, istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kadang-kadang digunakan secara bergantian. Meskipun pencampuradukan istilah ini tidak sepenuhnya benar, hal ini tidak terlalu memengaruhi kajian ekonomi secara keseluruhan, karena fokus utama akhirnya adalah perkembangan perekonomian suatu negara.

Dalam literatur ekonomi Islam, kedua istilah ini juga muncul. Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai "pertumbuhan berkelanjutan dari jenis output yang tepat yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia." Berdasarkan definisi ini, pertumbuhan ekonomi menurut Islam dianggap bernilai. Peningkatan dalam faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut mencakup barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi dalam Islam merujuk pada "proses mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan." Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Abulhasan M. Sadeq mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam Islam sebagai keseimbangan dan keberlanjutan dalam aspek materi dan non-materi yang didasarkan pada standar moral Islam yang tinggi. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat, yang menurut Islam saling terkait secara integral. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada perkembangan spiritual dan aspek kehidupan dunia serta akhirat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka, yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah dan dokumen relevan. Data sekunder ini mencakup informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain atau melalui media perantara dengan menganalisis serta menginterpretasikan informasi yang telah ada. Studi pustaka membantu peneliti untuk memahami konteks dan latar belakang masalah penelitian dengan lebih mendalam serta memperluas perspektif melalui referensi dari berbagai sumber terpercaya.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Kemajuan ekonomi dan perkembangan masyarakat manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fokus hanya pada satu aspek dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak komprehensif mengenai proses pembangunan. Islam sangat memperhatikan isu pembangunan ekonomi, tetapi menghubungkannya dengan pengembangan umat manusia secara keseluruhan. Peran utama Islam adalah membimbing manusia menuju jalan yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek terkait pembangunan ekonomi harus

terintegrasi dengan pengembangan umat manusia secara menyeluruh. Islam memiliki pandangan khusus tentang proses pembangunan, yang mencakup baik aspek material (ekonomi) maupun pembangunan manusia secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam dinilai tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga melalui aktivitas manusia yang memprioritaskan kemajuan material dan spiritual.

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat menyeluruh dan mencakup aspek spiritual, moral, dan material. Pembangunan dalam Islam diarahkan pada pencapaian tujuan yang berlandaskan pada nilai-nilai tertentu. Aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fisik adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Fokus utama dalam pembangunan ini adalah manusia beserta lingkungan budayanya. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang umumnya hanya menekankan pada lingkungan fisik sebagai area utama pembangunan. Dengan demikian, Islam memperluas cakupan objek pembangunan, tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mencakup manusia secara keseluruhan. Hal senada juga dikemukakan oleh Askari, dkk. konsep pembangunan Islam bahwa manusia bukan hanya sebagai sarana melainkan juga dijadikan sebagai tujuan dalam pembangunan ekonomi.

Para ahli ekonomi Muslim telah memperluas konsep pembangunan dengan memasukkan perkembangan yang seimbang antara aspek material dan spiritual, dengan menekankan penerapan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama. Ekonom Islam kontemporer seperti Khursid Ahmad telah mengembangkan pendekatan yang bersifat multidisiplin dan multidimensional, yang menjadi dasar konseptual di mana standar etika dan moral Islam terintegrasi erat dengan tujuan ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional, pendekatan Islam modern ini menawarkan pandangan sosial-etis yang unik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi manusia.

Khursid Ahmad, seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Tahir, merumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi sebagai berikut: Pertama, tauhid, yang mengacu pada pengakuan terhadap keesaan Allah dan kekuasaan-Nya dalam menetapkan aturan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan sesama (*habl-minallah wa habl-min-an-nas*). Kedua, *rububiyah*, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memiliki alam, serta memberikan rezeki. Semua hal berada di bawah pengetahuan, kehendak, dan kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas. Beriman bahwa hanya Allah SWT yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudharat, dan menjaga seluruh alam semesta. Ketiga, *khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan mengelola sumber daya yang diamanahkan oleh Allah SWT. Keempat, *tazkiyah*, yaitu penyucian manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, serta lingkungan dan masyarakat.

Gambar 1
Dasar-Dasar Filosofi Pembangunan Ekonomi versi Kursyid Ahmad



Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai tersebut, Khursid Ahmad menjelaskan aspek-aspek penting dari konsep pembangunan Islam sebagai berikut:

Pertama, pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat menyeluruh dan mencakup unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan adalah aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai, dengan aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fisik yang tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang dicapai mencakup kesejahteraan material di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Kedua, fokus utama pembangunan adalah manusia beserta lingkungan budayanya, yang berbeda dari konsep pembangunan ekonomi modern yang hanya memperhatikan lingkungan fisik. Islam memperluas cakupan objek pembangunan untuk mencakup aspek yang lebih luas. Ketiga, pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional yang memerlukan keseimbangan antara berbagai faktor untuk menghindari ketimpangan. Keempat, pembangunan ekonomi melibatkan perubahan baik kualitatif maupun kuantitatif, dan harus mempertahankan keseimbangan antara keduanya.

Konsep Tauhid

Tauhid adalah dasar ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang hanya berfokus pada aspek spiritual, melainkan sebuah agama yang menawarkan petunjuk dan kesejahteraan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Melalui tauhid, manusia memahami bahwa "tidak ada yang layak disembah selain Allah SWT" dan bahwa tidak ada pemilik langit, bumi, dan segala isinya selain Allah SWT. Allah SWT adalah pencipta dan pemilik alam semesta, termasuk manusia dan semua sumber daya yang ada. Hal ini tercermin dalam firman-Nya di surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya : "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 29).

Oleh karena itu, Allah SWT adalah pemilik sejati dari segala sesuatu. Manusia hanya diberi kepercayaan untuk "memiliki" sementara waktu sebagai bentuk ujian. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu di dunia tidak diciptakan tanpa tujuan, melainkan memiliki maksud tertentu. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya, dan oleh sebab itu, semua aktivitas manusia, termasuk yang berkaitan dengan alam dan sumber daya (muamalah), harus berada dalam kerangka hubungan dengan Allah. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah, termasuk dalam hal kegiatan ekonomi dan bisnis.

Setiap aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, perdagangan, dan distribusi harus dilandasi oleh prinsip-prinsip Ilahi dan diarahkan pada tujuan-tujuan Ilahi. Seorang Muslim akan merasa bahwa dalam bekerja atau berdagang, ia melaksanakan amanah yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Semakin baik amal perbuatannya, semakin meningkat pula ketaqwaan dan kedekatannya kepada Allah SWT.

Konsep Rububiyah (Keesaan dalam Mengatur Semesta Alam)

Mengesakan Allah SWT dalam penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan alam semesta, penghancurannya, pencabutan nyawa, dan kebangkitan kembali manusia merupakan manifestasi dari keyakinan rububiyah. Rububiyah mencakup pengaturan Ilahi dalam hal penyuburan dan kesinambungan kehidupan serta mengarahkan semua makhluk menuju kesempurnaan. Selain itu, sifat rububiyah juga mencakup bimbingan terhadap semua ciptaan Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan (sa'adah) di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-An'am ayat 164.

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا ۚ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ ١٦٤

Artinya : "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan" (QS. Al-An'am: 164).

Makna dari kata Tuhan (*Rab*) dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang Memelihara, Mengawasi, Mengatur, dan Mengelola seluruh alam semesta, termasuk segala yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ayat ini mengharuskan setiap Muslim untuk bertawakal dan mengikhlaskan semua aktivitas kehidupan dunia semata-mata untuk Allah SWT. Ini merupakan hukum dasar alam yang

menekankan pentingnya pembangunan sumber daya yang bermanfaat, serta dorongan untuk berbagi sumber daya tersebut. Tata cara yang ditetapkan oleh Allah SWT ini bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan sumber daya alam tetap seimbang dan berkelanjutan. Dalam kerangka yang suci inilah segala upaya manusia dalam pembangunan ekonomi dilaksanakan.

Konsep Khilafah

Dalam Al-qurán Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya”. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*muamalah*) antar kelompok- termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

Status sebagai khalifah atau penerima amanat dari Allah SWT berlaku secara universal untuk seluruh umat manusia, tanpa memberikan hak istimewa kepada individu atau bangsa tertentu dalam hal tugas kekhalifahan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kesamaan yang ada hanya terletak pada kesempatan, di mana setiap individu dapat memanfaatkan potensi tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah SWT menciptakan setiap individu dengan kemampuan yang berbeda, sehingga mereka secara alami diharapkan untuk hidup berdampingan, bekerja sama, dan saling memanfaatkan keahlian yang dimiliki.

Konsep Tazkiyah

Tazkiyah yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesamanya dan alam lingkungan, bangsa dan negara. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa al-tazkiyah adalah menjadikan sesuatu menjadi suci baik zatnya maupun keyakinan dan fisiknya. Allah SWT mensifati orang-orang yang mensucikan jiwa itu dengan keberuntungan dan mensifati orang-orang yang mengotorinya dengan kerugian.

Ibnu Jarir al-Thabari menafsirkan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang Allah sucikan jiwanya dari kekufuran dan kemaksiatan, serta memperbaikinya dengan amal shaleh. Untuk mencapai kesucian dan keberuntungan tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia harus menempuh jalan yaitu mentaati Allah SWT, membersihkan jiwanya dari akhlak tercela serta membersihkan jiwa dari berbagai hal yang dapat menyebabkan hina.

Tazkiyah berarti proses pembersihan atau pertumbuhan dan perbaikan. Dalam konteks epistemologi, tazkiyah merujuk pada kebersihan dan perlakuan dengan metode dan teknik tertentu, sesuai dengan syariat, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan upaya untuk meraih keridhaan Allah SWT. Tugas para nabi yang diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan kesucian (*tazkiyah*) umat manusia dalam berbagai aspeknya. Ini mencakup hubungan antara manusia dengan Allah SWT, antar sesama manusia, serta dengan lingkungan dan alam dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak dan

menyucikan umatnya, beliau membersihkan akidah dari syirik, menyucikan akhlak dari kebiasaan buruk dan perbuatan mungkar kaum jahiliyyah, serta membersihkan harta dari perkara yang syubhat dan gharar menuju yang halal dan baik. Dengan konsep tazkiyah ini, manusia dapat mengembangkan diri dan memperbaiki semua dimensi kehidupannya, termasuk ekonomi. Implikasi dari konsep tazkiyah ini adalah falah, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran di dunia dan akhirat.

Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat.

Asas tazkiyah bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan yang berujung pada keadilan. Semua ini mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan mencerminkan penerapan asas rububiyah, yaitu prinsip pendidikan, pemeliharaan, dan kontinuitas menuju kesempurnaan, sebagaimana sifat-sifat Ilahi.

Dengan demikian, jika empat nilai yang diusulkan oleh Khursyid Ahmad dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, maka negara akan lebih mudah mencapai cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip filosofis ini, dapat dijelaskan bahwa prinsip pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat holistik dan mencakup unsur spiritual, moral, serta material. Pembangunan berorientasi pada tujuan dan nilai, dengan aspek materi, moral, ekonomi, sosial, spiritual, dan fisik yang saling terkait. Kebahagiaan yang diinginkan tidak hanya sebatas kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Fokus utama pembangunan adalah manusia dan lingkungan kulturalnya, berbeda dengan pendekatan pembangunan ekonomi modern yang hanya menekankan pada lingkungan fisik. Dengan demikian, Islam memperluas cakupan pembangunan dari hanya lingkungan fisik menjadi juga mencakup manusia.

Pembangunan ekonomi adalah aktivitas yang multidimensional, sehingga semua usaha harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai faktor dan menghindari ketimpangan. Pendekatan utama dalam pembangunan menurut Islam adalah memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia dan lingkungannya secara optimal. Selain itu, pemanfaatan sumber daya harus dilakukan dengan pembagian yang adil dan peningkatan yang merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap bersyukur dan adil, serta menolak sikap kufur dan zhalim.

Dengan demikian, prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dari perspektif Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat holistik dan mencakup aspek spiritual, moral, serta material; 2) Fokus utama pembangunan adalah manusia dan lingkungan budaya di sekitarnya; 3) Pembangunan ekonomi merupakan aktivitas yang multidimensional, sehingga semua usaha harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai faktor dan menghindari ketimpangan; 4) Poin utama dalam pembangunan menurut Islam adalah memanfaatkan

sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia dan lingkungannya secara optimal.

M.A Mannan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep moderen tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi Islami, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata, tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertara dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pertumbuhan perkapita memang sangat bergantung pada sumber daya alam, namun sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin pembangunan ekonomi. Faktor lain yang sangat penting adalah perilaku manusia, yang memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membentuk perilaku manusia agar mendukung pembangunan. Negara-negara Muslim pada umumnya memiliki potensi lebih besar dan tidak mengalami kesulitan yang sama seperti negara-negara sekuler dalam upaya ini.

Khursyid Ahmad merumuskan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik sebagai berikut: pertama, fokus utama kebijakan pembangunan adalah pengembangan sumber daya manusia. Ini mencakup upaya untuk membangkitkan sikap dan apresiasi yang positif, pengembangan karakter dan kepribadian, pendidikan dan pelatihan untuk keterampilan, penelitian dan ilmu pengetahuan, serta peningkatan partisipasi.

Kedua, perluasan produksi yang bermanfaat. Produksi yang dimaksud tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan orang kaya tetapi juga untuk kepentingan umat manusia secara umum. Produksi barang-barang yang dilarang oleh Islam tidak akan diperbolehkan, sementara produksi yang bermanfaat akan didorong. Ada tiga prioritas utama: 1) Produksi dan ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan dasar dalam jumlah yang cukup, termasuk bahan konstruksi, jalan, dan kebutuhan lainnya dengan harga yang terjangkau. 2) Penguatan pertahanan dunia Islam di negara-negara Islam dengan peralatan militer yang memadai. 3) Swasembada dalam produksi kebutuhan primer.

Ketiga, perbaiki kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada lima aspek: 1) Penciptaan lapangan kerja melalui penataan struktural, teknologi, investasi, dan pendidikan. 2) Sistem keamanan nasional yang luas dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 3) Pembagian kekayaan dan pendapatan secara merata. 4) Pembangunan yang berimbang, yaitu harmonisasi antara berbagai daerah dalam satu negara dan antar sektor ekonomi. Desentralisasi ekonomi dan pembangunan yang tepat tidak hanya merupakan keadilan, tetapi juga penting untuk kemajuan maksimal. 5) Pengembangan teknologi baru yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi negara-negara, khususnya negara-negara Muslim. Pembangunan yang mandiri hanya dapat dicapai jika negara tersebut bebas dari bantuan asing dan mampu menguasai serta mengadaptasi teknologi dengan kreativitas sendiri dalam lingkungan sosial dan alam yang berbeda.

Masudul Alam Choudhury dalam bukunya *Contributions to Islamic Economic Theory* mengatakan bahwa ada lima prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan

dalam yang dikenal dengan prisma ekonomi Islam. Kelima prinsip tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Tauhid dan Persaudaraan

Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya bumi dan kekayaannya yang melimpah untuk kepentingan umat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Setiap orang yang beriman menyadari bahwa kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT. Untuk mewujudkan prinsip tauhid dan persaudaraan, Islam melarang riba dalam semua bentuk dan manifestasinya. Dalam perspektif tauhid, Allah SWT sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menetapkan bahwa segala kekayaan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia.

Work and Productivity (W)

Perintah bekerja telah Allah SWT wajibkan semenjak nabi yang pertama, Adam As. Sampai kepada nabi yang terakhir Muhammad SAW. perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan jabatan seseorang. Berikut dalil dari AlQur'an dan Sunnah tentang kewajiban bekerja.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٠

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung.” (QS. al- Jumah: 10).

Cooperate

Kerjasama diartikan sebagai usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama (cooperation) merupakan upaya atau kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam sistem ekonomi Islam, kerjasama adalah karakter yang sangat penting. Nilai kerjasama ekonomi ini harus tercermin dalam semua aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi barang, dan jasa. Prinsip kerjasama dalam ekonomi ini dapat menciptakan kegiatan produktif sehari-hari bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil dan melindungi kepentingan ekonomi dari kelompok atau pihak yang lemah.

Ownership

Prinsip ini merupakan implementasi dari nilai tauhid, di mana Allah SWT adalah pemilik utama langit, bumi, dan seluruh isinya, sementara manusia diberikan amanah untuk mengelolanya. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Konsep kepemilikan pribadi diakui, namun untuk memastikan keadilan dan mencegah penindasan sekelompok orang terhadap kelompok lain, cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi kehidupan banyak orang harus dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran, termasuk campuran antara swasta dan negara, swasta domestik dan asing, atau negara-negara asing, juga diperbolehkan dalam Islam.

Semua konsep ini berakar dari filosofi, norma, dan nilai-nilai Islam.

Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics

Distribution Equity

Dalam sistem ekonomi Islam, berbagai isu perekonomian diatur untuk mengoptimalkan distribusi dengan cara menetapkan aturan kepemilikan, cara mengelola kepemilikan, serta menyediakan dukungan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan harta yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, guna mencapai keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan di antara individu. Dengan demikian, Islam telah mengatasi masalah ketidakmerataan distribusi tersebut. Instrumen zakat digunakan untuk menangani kemiskinan dan mencakup berbagai aspek seperti perluasan peluang kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi orang tua, asuransi pengangguran, serta kompensasi bagi mereka yang kekurangan saat mengalami resesi dan depresi ekonomi.

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi dalam Islam mencerminkan keseimbangan dan keberlanjutan baik dalam aspek material maupun non-material, yang didasarkan pada nilai-nilai moral Islam. Menurut Khursyid Ahmad, dasar-dasar filosofis Islam yang mendasari pembangunan ekonomi meliputi prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Konsep pembangunan dalam Islam dapat dilihat dari prinsip tazkiyah, yaitu penyucian sikap dan hubungan manusia di bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falah, yaitu kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dari perspektif Islam meliputi: Pembangunan ekonomi yang komprehensif dengan unsur spiritual, moral, dan material; Fokus utama pada manusia dan lingkungan budayanya; Pembangunan ekonomi sebagai aktivitas multidimensional yang memerlukan keseimbangan berbagai faktor untuk menghindari ketimpangan; Penekanan pada pemanfaatan sumber daya yang diberikan Allah SWT secara optimal. Selain itu, lima prinsip dalam perekonomian Islam yang diperlukan untuk pembangunan, yang dikenal sebagai prisma ekonomi Islam menurut Masudul Alam Choudhury, adalah tauhid, kerja dan produktivitas, korporasi, kepemilikan, dan distribusi yang adil.

Daftar Pustaka

- Abdulhasan M Sadaq, *Development Issues in Islam*, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia, 2006.
- Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Fadllan, Fadllan. "Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M. Umer Chapra." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (2018): 393-426.
- — —. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan

- Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 5, no. 2 (2012): 257-274.
- Farhana Mohamad Suhaimi, Asmak Ab Rahman, Sabitha Marican, The role of share waqf in the socioeconomic development of the Muslim community: The Malaysian experience, *Humanomics*, Vol. 30 Issue: 3, pp.227-254, 2014.
- Hossein Askari dkk, *Understanding Islam: Development, Economic and Finance*, Munich Personal Repec Archive. No. 56016, 2013.
- Khursid Ahmad, *Economic Development in Islam Framework*, Studies in Islamic Economic, edited by Khoushid Ahmad, Islamic Research Foundation, Mashhad, 1980.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPPT STIM YKPN, 2016.
- Maya Masita Septiarini dan Sri Herianingrum. Analisis I-HDI (Islamic Human Development Index) di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Teapan*. Vol. 04 No. 05, 2017.
- Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nasir Nabi Bhat. The Economic Thought of Khurshid Ahmad. *Turkish Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Necati Aydin, Islamic versus conventional human development index: empirical evidence from ten Muslim countries, *International Journal of Social Economics*, 2016
- Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rasem N Kayed, M. Kabir Hassan, Saudi Arabia's economic development: entrepreneurship as a strategy, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 4 Issue: 1, pp.52-73, 2011.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sayyid Tahir, *Islamic Perspectives on Economic Development*. The Pakistan Development Review. 34:4 Part II, 1995.
- Seyed Kazem Sadr, The role of human capital in economic development of the earliest Islamic period", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 Issue: 4, 2015.
- Syamsuri, Pradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2, 2016.
- Yusuf Al-Qardhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001